



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA KAB/KOTA DI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ANISAH SIREGAR

NPM: 1925210174

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KAB/KOTA DI SUMATERA UTARA

NAMA : ANISAH SIREGAR
N.P.M : 1925210174
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
TANGGAL KELULUSAN : 20 September 2022

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr. E. Bakhtiar Chendi, SE., M.Si.

YAYASAN PROJEK KADIRUN YAHYA

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. E Rusiadi, S.E., M.Si., CIQaR., CICnR., CIMMR.

Dr. E Lia Nazdiana Nasution, SE., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANISAH SIREGAR
NPM : 1925210174
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KAB/KOTA DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2022



(Anisah Siregar)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANISAH SIREGAR
NPM : 1925210174
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA KAB/KOTA DI SUMATERA
UTARA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, *September 2022

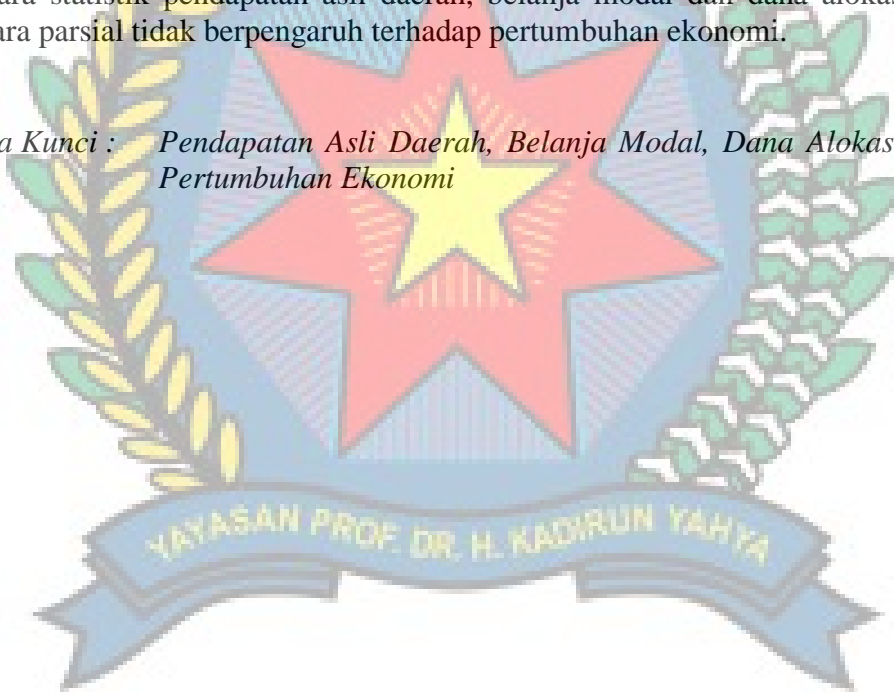


(Anisah Siregar)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Populasi adalah 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2016 sampai dengan 2019. Metode pengambilan sampel adalah sensus sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 33 data sampel. Metode analisis data menggunakan data panel dengan model uji Hausman yang terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji kesesuaian model estimasi, uji Chow mengindikasikan model *fixed effect model* lebih unggul daripada *random effect model*. Pada uji Hausman dan uji *Lagrange Multiplier* mengindikasikan model *random effect model* yang layak untuk dijadikan sebagai model. Maka model terpilih atau layak untuk pembuktian hipotesis yaitu *random effect model*. Secara statistik pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of local revenue, capital expenditure and general allocation funds on economic growth in the districts/cities of North Sumatra Province. This type of research was causal associative. The population is 33 districts/cities in North Sumatra from 2016 to 2019. The sampling method was census so that the number of samples used is 33 sample data. The data analysis method uses panel data with the Hausman test model selected. The results showed that based on the results of the estimation model fit test, the Chow test indicated that the fixed effect model was superior to the random effect model. The Hausman test and the Lagrange Multiplier test indicate a random effect model that was feasible to be used as a model. Then the model was selected or feasible to prove the hypothesis, namely the random effect model. Statistically, local revenue, capital expenditure and general allocation funds partially have no effect on economic growth.

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, General Allocation Fund for Economic Growth



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Sumatera Utara”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama proses penyusunan proposal skripsi ini, Penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, semua Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CIQaR., CIQnR., CIMMR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. E. Bakhtiar Efendi, S.E, M.Si., selaku ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si, CIQaR., CIQnR., CIMMR selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. E. Lia Nazliana Nasution, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang juga sudah banyak membantu memberikan masukan terhadap perbaikan skripsi ini.
 6. Seluruh bapak dan ibu dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi.
 7. Yang tercinta Ibu penulis, yakni Ibunda Nurhayati Hasibuan yang selalu memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, doa dan dukungan material maupun spiritual.
 8. Seluruh keluarga besar penulis, Kakak tercinta Aina Siregar dan Adetya Rizki Siregar yang memberikan semangat bagi penulis untuk terus berjuang.
 9. Sahabat Penulis, yakni Dini Oktavia, Karina Khairunnisa, Fauziah, Wirda khadija, Winda Kartika, Siti Muslihah, serta teman teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan pelajaran yang berarti bagi penulis.
- Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dan para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.
- Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Medan, September 2022
Penulis,

ANISAH SIREGAR
NPM: 1925210174

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	18
1. Identifikasi Masalah	18
2. Batasan Masalah	19
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Manfaat Penelitian	21
E. Keaslian Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Landasan Teori	23
1. Pertumbuhan Ekonomi	23
2. Pendapatan Asli Daerah	35
3. Belanja Modal	41
4. Dana Lokasi Umum	44
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
C. Defenisi Operasional Variabel	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
1. Jenis Data	53
2. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisa Data	54
1. Analisis Regresi Data Panel	54
2. Uji Asumsi Klasik	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Perekonomian Provinsi Sumatera Utara	57
2. Model Data Panel.....	60
3. Uji Spesifikasi Model.....	63
4. Uji Asumsi Klasik	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	76
 LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	2
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah	6
Tabel 1.3 Belanja Modal	9
Tabel 1.4 Dana Alokasi Umum.....	12
Tabel 1.5 Rekapitulasi Data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, BM, DAU	13
Tabel 1.6 Keaslian Penelitian.....	22
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	51
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	52
Tabel 4.1 Common Effect Model.....	60
Tabel 4.2 Fixed Effect Model	61
Tabel 4.3 Random Effect Model.....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	64
Tabel 4.6 Hasil Lagrange Multiplier.....	65
Tabel 4.7 Uji Kesesuaian Model Estimasi	66
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi	67



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi	4
Gambar 1.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah.....	8
Gambar 1.3 Grafik Belanja Modal.....	11
Gambar 1.4 Grafik Dana Alokasi Umum	13
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	49
Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas dengan Uji Jarque Bera.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan prosedur kerangka perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai prosedur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dibangun dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut (Yuliana, 2014), pertumbuhan ekonomi adalah *output* yang dihasilkan dari berbagai sektor yang memberikan gambaran kemajuan atau kemunduran yang telah diraih dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat nyata, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tinggi diharapkan akan menyerap tenaga kerja yang ada.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan konstan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pertumbuhan daerah jadi bagian integral dari pertumbuhan nasional yang dilaksanakan secara harmonis dan terpadu. Tujuan fundamental pembangunan daerah yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kesenjangan pendapatan rendah dapat diraih tetapi tidak secara bersamaan (Shin, 2012). Oleh karena itu guna mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan *plan* pembangunan ekonomi yang baik karena pada basisnya pembangunan ekonomi suatu daerah berhubungan erat dengan

kapasitas ekonomi dan karakteristik yang dimiliki, yang mana pada normalnya berbeda antar daerah satu dengan lainnya.

Selain Pendapatan Asli Daerah yang merefleksikan pertumbuhan ekonomi, belanja modal juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (teori ekonomi klasik Adam Smith), menyatakan bahwa belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berkaitan satu dengan yang lainnya. Belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk rangka pembelian dan penyediaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipakai dalam operasional pemerintahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami penyusutan -1,07 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,22% (yoy) di Tahun 2020. Kontraksi terjadi karena didorong penurunan permintaan akibat terbatasnya daya beli masyarakat dan juga ekspor yang melambat.

Di bawah ini adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Sumatera Utara

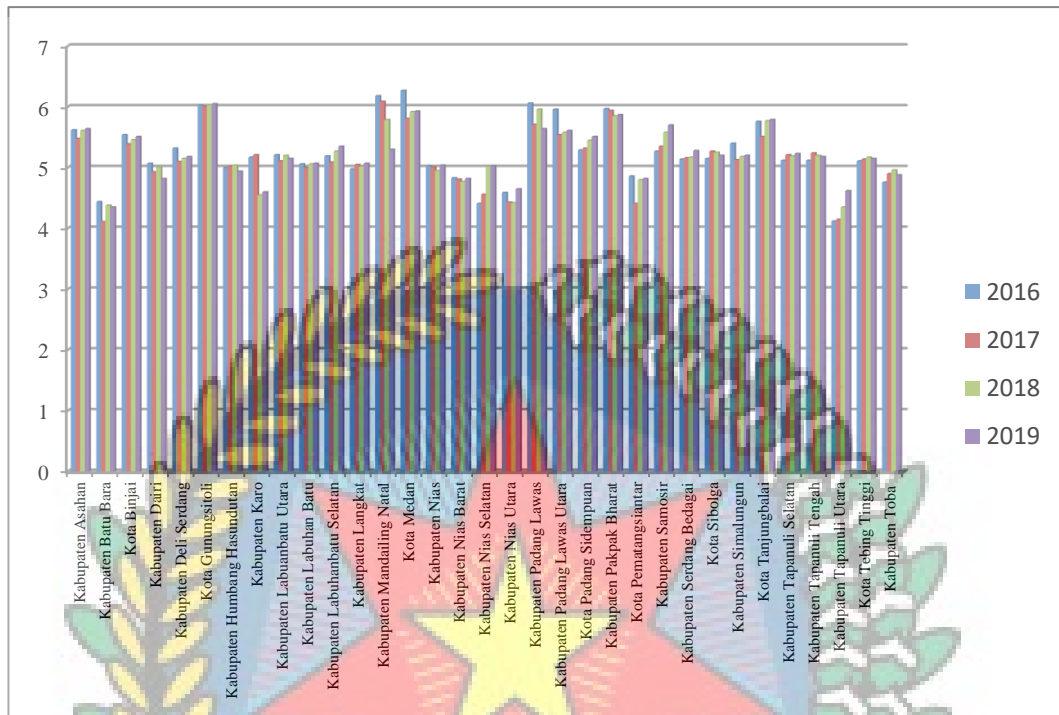
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64
Kabupaten Batu Bara	4,44	4,11	4,38	4,35
Kota Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51
Kabupaten Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82
Kabupaten Deli Serdang	5,32	5,1	5,15	5,18
Kota Gunungsitoli	6,03	6,01	6,03	6,05
Kabupaten Humbang Hasundutan	5	5,02	5,04	4,94
Kabupaten Karo	5,17	5,21	4,55	4,6
Kabupaten Labuanbatu Utara	5,21	5,11	5,2	5,15
Kabupaten Labuhan Batu	5,06	5	5,06	5,07

Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35
Kabupaten Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07
Kabupaten Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,3
Kota Medan	6,27	5,81	5,92	5,93
Kabupaten Nias	5,03	5,01	4,95	5,04
Kabupaten Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82
Kabupaten Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03
Kabupaten Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65
Kabupaten Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64
Kabupaten Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61
Kota Padang Sidempuan	5,29	5,32	5,45	5,51
Kabupaten Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87
Kota Pematangsiantar	4,86	4,41	4,8	4,82
Kabupaten Samosir	5,27	5,35	5,58	5,7
Kabupaten Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28
Kota Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,2
Kabupaten Simalungun	5,4	5,13	5,18	5,2
Kota Tanjungbalai	5,76	5,51	5,77	5,79
Kabupaten Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23
Kabupaten Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,2	5,18
Kabupaten Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62
Kota Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15
Kabupaten Toba	4,76	4,9	4,96	4,88

Sumber : BPS, data diolah, 2021

Dari tabel 1.1 di atas Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sedangkan kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan yang labil tiap tahunnya. Dari tabel di atas terlihat kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 adalah kota Gunung Sitoli. Sedangkan yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah pada tahun 2019 adalah kabupaten Batu Bara.

Berikut ini grafik pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : BPS, data diolah, 2021

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Sumatera Utara

Pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Terkait Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk dipakai sebagai modal dasar pemerintah daerah guna membiayai ekspansi dan upaya daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

Daerah yang madalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Hal ini bisa dipahami karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka derajat dependensi Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat terkait APBD akan semakin rendah. Keberhasilan suatu daerah dalam menaikkan pendapatannya akan bersangkutan pada kenaikan kapabilitas daerah dalam membiayai hajat belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan menaikkan status kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan status kehidupan masyarakat diwujudkan dalam format pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu akar dari pendapatan yang berguna untuk membiayai hajat daerah tersebut layaknya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah pun dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Siswiyanti, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dijatahkan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan dengan tujuan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah

guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kaitannya dengan keseimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, hal ini merupakan konsekuensi adanya pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang penting.

Berikut merupakan tabel pendapatan asli daerah kab/kota pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Asahan	104.817	107.890	12.171	138.454
Kabupaten Dairi	75.648	66.344	101.426	86.181
Kabupaten Deli Serdang	672.229	662.616	1.000.927	1.168.366
Kabupaten Tanah Karo	92.659	104.000	147.751	105.472
Kabupaten Labuhan Batu	161.886	163.990	180.543	197.779
Kabupaten Langkat	115.313	131.076	144.051	151.481
Kabupaten Mandailing Natal	85.509	100.112	117.662	120.129
Kabupaten Nias	69.414	77.222	81.394	86.228
Kabupaten Simalungun	119.980	213.790	661.815	193.509
Kabupaten Tapanuli Selatan	90.666	81.436	110.678	138.752
Kabupaten Tapanuli Tengah	64.005	72.370	100.000	115.003
Kabupaten Tapanuli Utara	67.184	94.624	110.009	123.600
Kabupaten Toba Samosir	37.452	44.368	50.147	57.066
Kota Binjai	88.674	98.283	136.033	138.086
Kota Medan	1.827.197	1.973.780	2.112.663	2.338.282
Kota Pematang Siantar	111.208	116.509	128.188	119.600
Kota Sibolga	65.159	78.454	108.129	114.280
Kota Tanjung Balai	63.899	65.315	69.061	91.602
Kota Tebing Tinggi	86.116	97.354	105.580	108.650
Kota Padang Sidempuan	69.108	9.130	93.314	95.201
Kabupaten Pakpak Barat	15.235	24.297	28.170	21.287
Kabupaten Nias Selatan	14.111	14.160	21.079	21.079

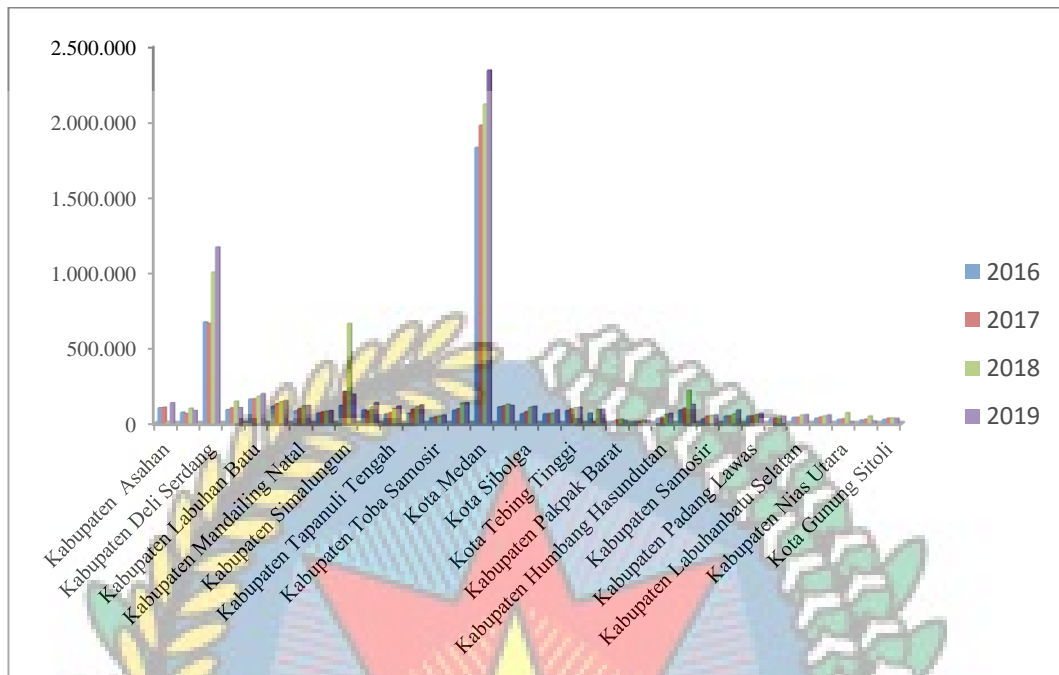
Kabupaten Humbang Hasundutan	35.045	41.679	61.717	66.211
Kabupaten Serdang Bedagai	89.260	102.480	219.157	126.502
Kabupaten Samosir	30.786	50.000	54.289	57.343
Kabupaten Batu Bara	50.427	51.591	63.226	90.411
Kabupaten Padang Lawas	49.991	52.300	59.568	68.694
Kabupaten Padang Lawas Utara	32.166	35.150	50.219	49.355
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	41.170	41.170	57.291	59.064
Kabupaten Labuhanbatu Utara	35.326	43.183	51.069	56.772
Kabupaten Nias Utara	28.000	32.005	71.897	12.540
Kabupaten Nias Barat	24.000	28.740	50.000	17.721
Kota Gunung Sitoli	28.000	34.937	36.676	34.020

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 Dapat diketahui bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota tergolong begitu rendah dibanding belanja modal. Dari sisi pendapatan, keuangan pemerintah daerah masih sangat bergantung dari *movement* dana perimbangan, sehingga kemandirian fiskal masih sangat rendah. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, rasio PAD terhadap pendapatan cenderung turun, bahkan pada tahun 2017 kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tercatat 18,7% (kategori kurang) (Sumber:www.bi.go.id).

Dari tabel di atas terlihat kabupaten/kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah Kota Medan, Kota Binjai Dan Kota Deli Serdang. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara.

Berikut ini grafik PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah,2021

Gambar 1.2 Grafik PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 diterangkan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk membenahi anggaran daerah tersebut dengan mengurangi campur tangan Pemerintah Pusat, dan menyangkutkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Hal ini persis yang dilakukan oleh Proses penyusunan APBD diawali dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislative membina kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bekerja membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirundingkan.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini

diharapkan dapat menaikkan minat investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini dapat terwujud jika terdapat upaya pemerintah dalam memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih tinggi untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi menyumbangkan kewenangan yang lebih tinggi dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Adi, 2012). Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal melingkupi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut (Wertianti & Dwirandra, 2013) Belanja modal dapat dikategorikan menjadi lima jenis yaitu antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada hajat daerah terhadap sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun guna memenuhi fasilitas publik. Selama ini belanja daerah banyak digunakan untuk belanja rutin yang cenderung kurang produktif (Wandira, 2013).

Berikut merupakan tabel belanja modal kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.3 Belanja Modal Kab/Kota di Sumatera Utara

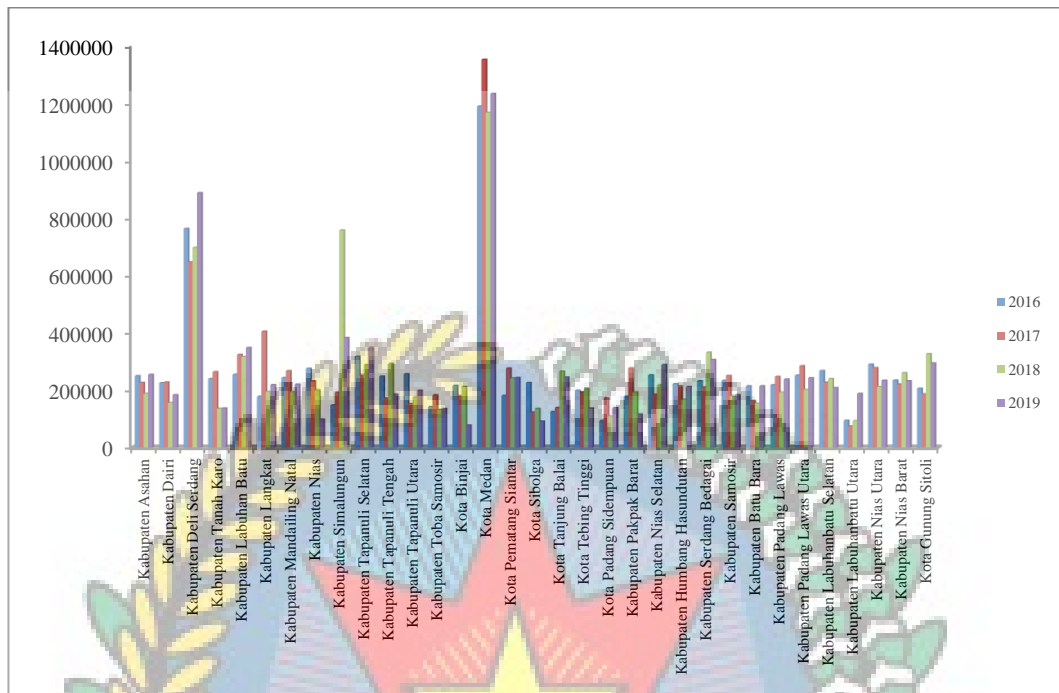
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Asahan	250239,9	226816,6	188517,5	254691,8
Kabupaten Dairi	226059,9	228408,8	156649,7	183892,1
Kabupaten Deli Serdang	763542,4	647202,9	697679	888436,5

Kabupaten Tanah Karo	240248	264211,7	136537,4	137501,7
Kabupaten Labuhan Batu	254996,6	324161	317120	348522,4
Kabupaten Langkat	178408,1	405340,1	195936,3	219386,5
Kabupaten Mandailing Natal	243804,5	267628,6	194466,4	221051,7
Kabupaten Nias	276204,2	232139,9	200870,2	99053,91
Kabupaten Simalungun	148253,1	192985,3	757902	383467,7
Kabupaten Tapanuli Selatan	317665,6	251102,5	288503,5	347972,1
Kabupaten Tapanuli Tengah	248422,9	172251,6	293563,4	186108,9
Kabupaten Tapanuli Utara	256894	153059,7	175999,7	199595,2
Kabupaten Toba Samosir	142747,2	183534,1	133444,9	135812,7
Kota Binjai	216693,8	180664	212613	78230,95
Kota Medan	1190129	1352896	1168438	1234065
Kota Pematang Siantar	181491,1	276945	242298	244087,6
Kota Sibolga	226448	123807,8	136425,2	91881,66
Kota Tanjung Balai	125335,8	139514,6	265955,9	245414,2
Kota Tebing Tinggi	199694,8	193474,2	204916,8	137722,3
Kota Padang Sidempuan	94047,29	173100,6	110303,4	138867,7
Kabupaten Pakpak Barat	178753,2	277516,9	193622	116620,5
Kabupaten Nias Selatan	252958,3	185452,7	218057,7	289127,1
Kabupaten Humbang Hasundutan	222583,3	215016,2	168058	212002,4
Kabupaten Serdang Bedagai	232627,8	211181,5	332119,5	306607,2
Kabupaten Samosir	234208,8	251183,4	180588,3	184085,3
Kabupaten Batu Bara	214811,9	163584,2	153730,9	214974,3
Kabupaten Padang Lawas	218812,8	247447,8	193354,6	238599,1
Kabupaten Padang Lawas Utara	252138,6	284894,7	202600,7	243120,4
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	268353,4	227493	240181	208775,7
Kabupaten Labuhanbatu Utara	94863,21	74592,57	93507,96	188471,6
Kabupaten Nias Utara	290513	278410,7	212637,9	234129,2
Kabupaten Nias Barat	235002,7	221099,9	261221,8	232590,4
Kota Gunung Sitoli	206785,2	186700,4	326730,8	294734,2

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id ,data diolah,2021

Dari tabel 1.3 di atas terlihat kabupaten/kota yang memiliki belanja modal tertinggi pada tahun 2019 adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Nias, Kota Binjai dan Kota Sibolga.

Berikut ini grafik belanja modal kab/kota di Sumatera Utara.



Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah, 2021

Gambar 1.3 Grafik Belanja Modal Kab/Kota di Sumatera Utara

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang konsisten terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Berikut merupakan tabel dana alokasi umum kabupaten/kota Sumatera

Utara.

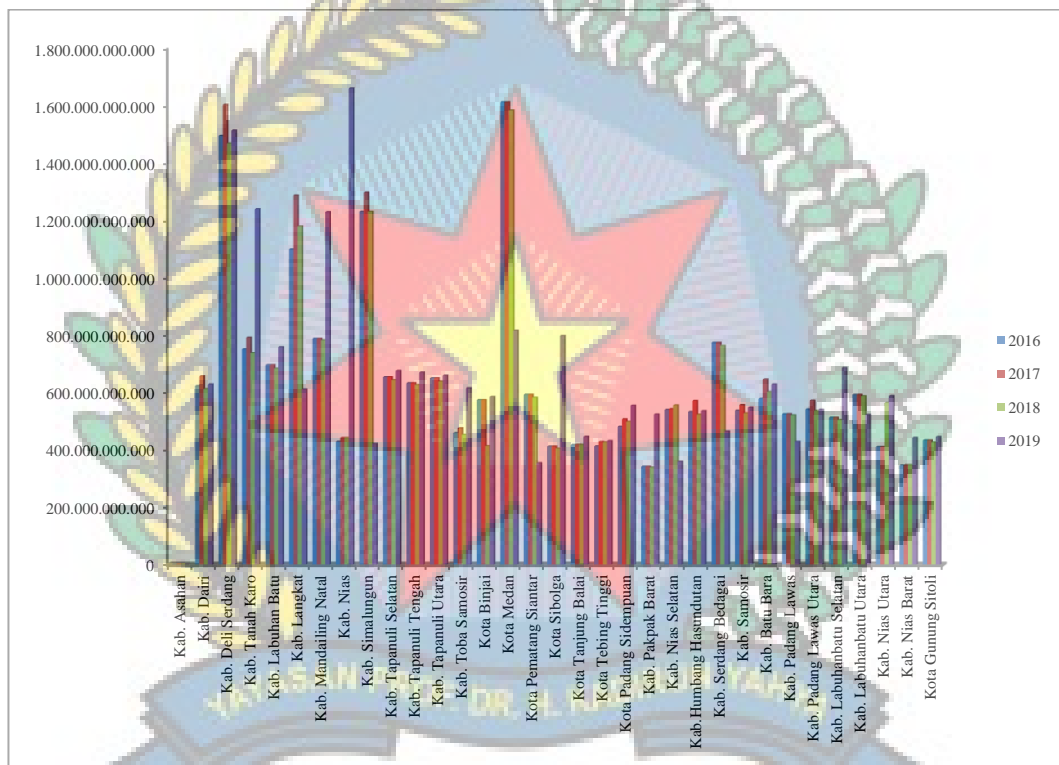
Tabel 1.4 Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kab. Asahan	891.149.644	955.691.774	877.794.641	917.363.719
Kab. Dairi	623.702.235.000	657.581.285.622	612.745.792.000	629.145.028.000
Kab. Deli Serdang	1.494.821.153.000	1.603.084.535.000	1.468.561.952.000	1.513.584.154.000
Kab. Tanah Karo	751.581.176.000	792.406.517.394	738.378.312.000	1.239.639.944.134
Kab. Labuhan Batu	696.646.309.000	696.646.309.000	684.408.474.000	758.968.872.000
Kab. Langkat	1.099.486.754.000	1.287.427.165.908	1.179.392.864.000	611.629.351.000
Kab. Mandailing Natal	788.477.434.000	788.477.434.000	783.200.132.000	1.229.427.123.000
Kab. Nias	429.582.510.000	442.479.925.600	442.822.379.600	1.660.238.913.000
Kab. Simalungun	1.230.816.187.000	1.297.673.223.692	1.230.816.187.000	422.054.364.000
Kab. Tapanuli Selatan	654.669.272.000	654.669.272.000	644.304.467.000	676.183.229.000
Kab. Tapanuli Tengah	633.513.831.000	633.513.831.000	627.027.553.000	670.689.528.000
Kab. Tapanuli Utara	650.827.006.000	650.827.006.000	639.394.068.000	659.877.311.000
Kab. Toba Samosir	459.549.788.000	476.191.394.272	453.737.230.000	616.197.680.000
Kota Binjai	574.469.158.000	574.469.158.000	413.837.391.000	585.637.664.000
Kota Medan	1.611.940.995.000	1.611.940.995.000	1.583.624.375.000	816.400.130.000
Kota Pematang Siantar	593.532.667.000	593.532.667.000	583.106.207.000	354.721.524.000
Kota Sibolga	412.805.887.000	412.805.887.000	405.554.215.000	798.240.981.000
Kota Tanjung Balai	418.170.500.000	418.850.996.000	418.666.416.000	446.820.629.000
Kota Tebing Tinggi	413.508.880.000	428.475.763.000	427.268.868.000	432.026.491.000
Kota Padang Sidempuan	481.834.636.000	507.686.451.000	498.768.033.000	554.953.633.000
Kab. Pakpak Barat	342.284.663.000	342.284.663.000	339.271.690.000	524.337.438.000
Kab. Nias Selatan	540.753.630.000	543.052.446.000	556.410.357.000	359.696.030.000
Kab. Humbang Hasundutan	533.184.787.000	571.801.064.876	523.818.445.000	536.163.886.000
Kab. Serdang Bedagai	774.457.677.000	774.457.677.000	763.943.386.000	465.249.052.000
Kab. Samosir	537.940.690.000	557.421.053.928	528.490.802.000	548.690.496.000
Kab. Batu Bara	578.874.665.000	646.547.539.588	602.464.355.000	628.895.139.000
Kab. Padang Lawas	525.047.157.000	525.591.211.000	521.562.942.000	429.134.187.000
Kab. Padang Lawas Utara	542.199.556.000	572.675.409.000	537.469.609.000	541.104.708.000
Kab. Labuhanbatu Selatan	513.547.168.000	513.547.168.000	504.525.796.000	686.644.553.000
Kab. Labuhanbatu Utara	592.813.148.000	593.232.429.000	588.021.836.000	522.907.314.000
Kab. Nias Utara	410.931.630.000	411.036.299.000	564.377.582.000	588.723.530.000
Kab. Nias Barat	346.451.709.000	347.545.033.000	348.251.352.000	443.235.113.000
Kota Gunung Sitoli	434.259.520.000	434.259.520.000	426.758.929.000	446.102.654.000

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah, 2021

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki dana alokasi umum tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Kab Mandailing Natal dan Kabupaten Nias. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki dana alokasi umum terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Nias Selatan.

Berikut ini grafik dana alokasi umum kabupaten/kota di Sumatera Utara.



Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah,2021

Gambar 1.4 Grafik Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Sumatera Utara

Dari tabel yang sudah diuraikan di atas maka dapat direkapitulasi berdasarkan rata-rata total nilai tertinggi data pertumbuhan ekonomi, pad, belanja modal dan dana alokasi umum seperti tabel di bawah ini

Tabel 1.5 Rekapitulasi Data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Sumatera Utara Periode 2016-2019

No	Keterangan	Nilai Tertinggi sampai terendah	Rata-rata
1	Pertumbuhan Ekonomi	Kota Gunungsitoli Kota Medan Kabupaten Pakpak Bharat	6,03 5,98 5,91

		Kabupaten Mandailing Natal	5,84
		Kabupaten Padang Lawas	5,84
		Kota Tanjungbalai	5,71
		Kabupaten Padang Lawas Utara	5,67
		Kabupaten Asahan	5,59
		Kabupaten Samosir	5,48
		Kota Binjai	5,48
		Kota Padang Sidempuan	5,39
		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5,23
		Kabupaten Simalungun	5,23
		Kota Sibolga	5,22
		Kabupaten Deli Serdang	5,19
		Kabupaten Serdang Bedagai	5,19
		Kabupaten Tapanuli Selatan	5,19
		Kabupaten Tapanuli Tengah	5,19
		Kabupaten Labuanbatu Utara	5,17
		Kota Tebing Tinggi	5,14
		Kabupaten Labuhan Batu	5,05
		Kabupaten Langkat	5,03
		Kabupaten Nias	5,01
		Kabupaten Humbang Hasundutan	5,00
		Kabupaten Dairi	4,96
		Kabupaten Karo	4,88
		Kabupaten Toba	4,88
		Kabupaten Nias Barat	4,81
		Kabupaten Nias Selatan	4,76
		Kota Pematangsiantar	4,72
		Kabupaten Nias Utara	4,52
		Kabupaten Batu Bara	4,32
		Kabupaten Tapanuli Utara	4,31
		Kabupaten Nias	2062980,5
		Kota Binjai	876034,5
		Kabupaten Labuanbatu Utara	297273,5
		Kabupaten Deli Serdang	176049,5
		Kota Gunungsitoli	135480,3
		Kabupaten Samosir	134349,8
		Kabupaten Nias Barat	118876,3
		Kota Medan	115269,0
		Kabupaten Dairi	112470,5
		Kabupaten Humbang Hasundutan	105853,0
		Kabupaten Labuhan Batu	105383,0
		Kabupaten Padang Lawas	99425,0
		Kabupaten Langkat	98854,3
		Kabupaten Nias Selatan	91505,5
		Kabupaten Asahan	90833,0
		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	87844,5
		Kabupaten Batu Bara	82399,8
		Kabupaten Karo	78564,5
2	Pendapatan Asli Daerah		

		Kabupaten Nias Utara	72469,3
		Kabupaten Padang Lawas Utara	66688,3
		Kota Sibolga	63913,8
		Kabupaten Simalungun	57638,3
		Kota Pematangsiantar	51163,0
		Kabupaten Tapanuli Selatan	49673,8
		Kabupaten Serdang Bedagai	48104,5
		Kabupaten Mandailing Natal	47258,3
		Kabupaten Tapanuli Tengah	46587,5
		Kota Tanjungbalai	41722,5
		Kabupaten Tapanuli Utara	36110,5
		Kabupaten Toba	33408,3
		Kota Tebing Tinggi	30115,3
		Kota Padang Sidempuan	22247,3
		Kabupaten Pakpak Bharat	17607,3
		Kabupaten Nias	1236382,0
		Kota Binjai	749215,2
		Kabupaten Labuanbatu Utara	370652,0
		Kabupaten Deli Serdang	311200,0
		Kabupaten Labuhan Batu	301310,9
		Kabupaten Samosir	270634,0
		Kabupaten Tapanuli Utara	253922,7
		Kabupaten Toba	253737,7
		Kota Gunungsitoli	249767,8
		Kota Tanjungbalai	245688,6
		Kota Tebing Tinggi	237478,7
		Kabupaten Pakpak Bharat	236399,0
		Kabupaten Nias Barat	236205,4
		Kabupaten Tapanuli Selatan	236200,8
		Kabupaten Humbang Hasundutan	231737,8
		Kabupaten Asahan	230066,5
3	Belanja Modal	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	225086,7
		Kabupaten Simalungun	224553,6
		Kabupaten Serdang Bedagai	212516,5
		Kota Pematangsiantar	204415,0
		Kabupaten Karo	202067,1
		Kabupaten Batu Bara	198752,6
		Kabupaten Langkat	196387,2
		Kabupaten Dairi	194624,7
		Kabupaten Nias Utara	194055,1
		Kota Padang Sidempuan	191628,2
		Kota Sibolga	186775,3
		Kabupaten Padang Lawas	183952,0
		Kota Medan	172050,4
		Kabupaten Mandailing Natal	148884,7
		Kabupaten Nias Selatan	144640,7
		Kabupaten Padang Lawas Utara	129079,7
		Kabupaten Tapanuli Tengah	112858,8

		Kota Binjai	1520012948500,0
		Kabupaten Nias	1405976623750,0
		Kabupaten Labuanbatu Utara	1045339990423,0
		Kota Gunungsitoli	1044484033727,0
		Kabupaten Humbang Hasundutan	897395530750,0
		Kabupaten Dairi	880501487382,0
		Kabupaten Karo	743780932050,0
		Kabupaten Deli Serdang	709167491000,0
		Kabupaten Samosir	694526948000,0
		Kabupaten Labuhan Batu	657456560000,0
		Kabupaten Langkat	650231347750,0
		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	641186185750,0
		Kabupaten Batu Bara	630793585155,5
		Kota Sibolga	614195424647,0
		Kabupaten Tapanuli Tengah	574243681750,0
		Kabupaten Tapanuli Selatan	554566171250,0
		Kota Tanjungbalai	548362320500,0
		Kabupaten Serdang Bedagai	543135760482,0
		Kota Pematangsiantar	541242045719,0
		Kota Medan	537103342750,0
		Kabupaten Nias Barat	531223266250,0
		Kabupaten Padang Lawas Utara	510810688250,0
		Kabupaten Nias Selatan	507351742500,0
		Kabupaten Mandailing Natal	501419023068,0
		Kabupaten Simalungun	500333874250,0
		Kabupaten Pakpak Bharat	499978115750,0
		Kabupaten Tapanuli Utara	493767260250,0
		Kabupaten Toba	435345155750,0
		Kabupaten Nias Utara	425627135250,0
		Kabupaten Padang Lawas	425320000500,0
		Kota Padang Sidempuan	387044613500,0
		Kota Tebing Tinggi	371370801750,0
		Kabupaten Asahan	910499944,5
4	Dana Alokasi Umum		

Sumber: Data Diolah, 2021

Pada tabel 1,5 dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Nias memiliki PAD tertinggi periode 2016-2019 di Sumatera tetapi tidak diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula (terlihat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Gunungsitoli). Kabupaten Nias telah berupaya menggali berbagai potensi daerah, terutama seperti pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, pemerintah akan berupaya mengelola PAD untuk membangun perekonomian dari berbagai sektor daerah sehingga dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya, Kabupaten Nias belum optimal mengelola pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pertumbuhannya.

Demikian juga fenomena belanja modal daerah tertinggi terjadi pada Kabupaten Nias. Namun belanja modal yang telah diperoleh pengelolaannya kurang efisien dan efektif menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan belanja modal daerah lebih banyak digunakan untuk biaya pemeliharaan atau biaya administrasi. Sedangkan dana alokasi umum daerah tertinggi terjadi pada Kota Binjai periode 2016-2019. Kondisi ini mengindikasikan pembangunan di berbagai sektor mengalami peningkatan yang cukup besar di Kota Binjai. Tetapi Kota Binjai tidak menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi kab/kota tahun 2016-2019 di Sumatera Utara sering waktu cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Gunungsitoli merupakan suatu kota yang sedang mengalami perkembangan dari berbagai sektor ekonomi. Kota ini sedang berbenah diri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Beberapa penelitian terdahulu, Dewi dan Ida (2018) menyatakan bahwa variabel PAD secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.oleh (Dewi & Saputra, 2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Paat et al.,

2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/ Kota di Sumatera Utara “**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendapatan asli daerah

- 1) Pendapatan asli daerah cenderung bersifat tidak tetap setiap tahunnya, tetapi ada kecenderungan mengalami peningkatan.
- 2) Peningkatan pendapatan asli daerah kab/kota tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

b. Belanja modal

- 1) Belanja modal yang telah diperoleh cukup tinggi khususnya di Kabupaten Nias tetapi pengelolaannya kurang efisien dan efektif menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
- 2) Belanja modal daerah lebih banyak digunakan untuk biaya pemeliharaan atau biaya administrasi.

c. Dana alokasi umum

- 1) Dana alokasi umum daerah yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya bersifat mengalami peningkatan seiring waktu untuk pemerataan pembangunan daerah.
- 2) Dana alokasi umum daerah tertinggi pada Kota Binjai yang mengindikasikan pembangunan di berbagai sektor mengalami peningkatan yang cukup besar tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

d. Pertumbuhan ekonomi

- 1) Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Kota Gunungsitoli yang sedang mengalami perkembangan dari berbagai sektor ekonomi.
- 2) Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan yang dapat disebabkan peningkatan pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Penulis melakukan penelitian terhadap pertumbuhan ekonomi hanya dengan menggunakan Apakah pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum sebagai indikator dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- b. Periode penelitian yang diamati terbatas hanya empat tahun yaitu tahun 2016-2019.
- c. Objek penelitian adalah kab/kota Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Sumatera Utara?
2. Bagaimana belanja modal berdampak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Sumatera Utara?
3. Bagaimana dana alokasi umum berdampak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.
- b. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.
- c. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pola pikir penulis tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai audit sehingga dapat menjadi referensi untuk mahasiswa/mahasiswi lain dalam melakukan penelitian.

c. Bagi Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk memberikan informasi dan pengambilan keputusan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memodifikasi hasil penelitian Dewi dan Ida (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, PMA dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Ida (2018) yaitu:

1. Dependen variabel Dewi dan Ida sama dengan penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi
2. Independen variabel Dewi dan Ida yaitu Pendapatan Asli Daerah, PMA dan Inflasi, sedangkan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan dana alokasi umum.

3. Periode observasi penelitian Dewi dan Ida tahun 1990-2012, sedangkan penelitian ini periode tahun 2016-2019.
4. Metode penelitian Dewi dan Ida adalah sama yaitu penelitian Regresi linier berganda.
5. Populasi dan sampel penelitian Dewi dan Ida adalah Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Ikhtisar originalitas penelitian ini tercantum pada Tabel 1.6

Tabel 1.6 Keaslian Penelitian

Uraian	Penelitian Terdahulu Dewi dan Ida (2018)	Penelitian Sekarang 2022
Variabel Dependen	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
Variabel Independen	Pendapatan Asli Daerah, PMA dan Inflasi	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan alokasi umum
Metode Penelitian	Regresi linier berganda	Regresi linier berganda
Tahun Penelitian	1990-2012	2016-2019
Populasi Penelitian	Provinsi Bali	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber, data diolah, 2022



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

(Sukirno, 2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu: pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Secara normal, pertumbuhan ekonomi diterjemahkan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya kegiatan perekonomian merupakan proses aplikasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan keluaran, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Hal ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau

nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang berbeda. Keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang mendeskripsikan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga pada modernisasi aktivitas ekonomi, misalnya pada upaya merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah menambah laju pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2011:423)

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian.

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini diprakarsai oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Menurut teori ini, pada awalnya peningkatan penduduk akan mengakibatkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun, apabila jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

Pada kondisi ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil

yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- 1) Perekonomian bersifat tertutup.
- 2) Dorongan menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar mencetuskan analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang terencana (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n$$

Dimana :

g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang

c. Teori pertumbuhan neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu ikut mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya boleh sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terpantau dari peningkatan *skill* atau

kemajuan teknik, sehingga produktivitas *capital* meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar keadaan selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Seperti halnya dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah menghapus hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana hubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari teori neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang yakin (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

d. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilaksanakan oleh para pengusaha dan menyatakan bahwa kemajuan teknologi begitu ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara.

Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

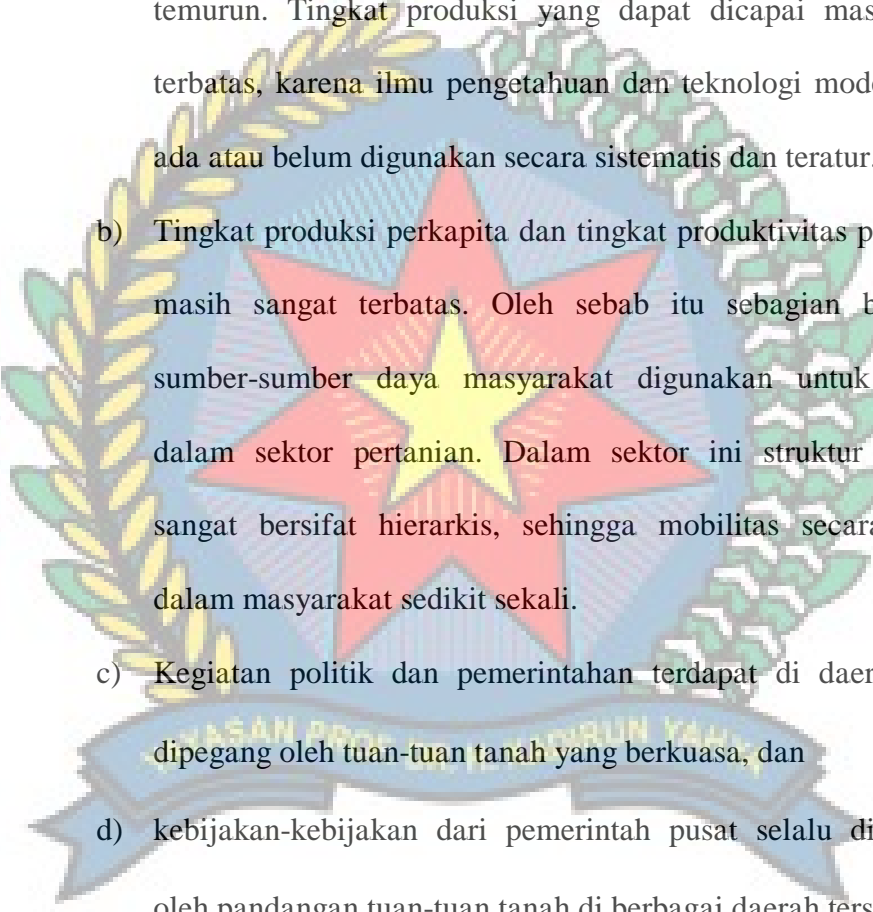
Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa apabila tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin berjalan lambat dan pada akhirnya mencapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationarystate*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud ini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu diraih pada derajat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

e. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Teori ini dimunculkan oleh Prof. W.W. Rostow yang memberikan lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental dalam corak kegiatan ekonomi, juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara.

Adapun kelima tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*) Rostow mengartikan bahwa masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang:

- 
- a) Cara-cara memproduksi yang relatif primitif dan sikap masyarakat serta cara hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Tingkat produksi yang dapat dicapai masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum ada atau belum digunakan secara sistematis dan teratur.
 - b) Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas per pekerja masih sangat terbatas. Oleh sebab itu sebagian besar dari sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Dalam sektor ini struktur sosialnya sangat bersifat hierarkis, sehingga mobilitas secara vertikal dalam masyarakat sedikit sekali.
 - c) Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat di daerah-daerah dipegang oleh tuan-tuan tanah yang berkuasa, dan
 - d) kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah tersebut.

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas

Tahap ini adalah tahap sebagai suatu masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya ataupun dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustain growth*). Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis. Tahap prasyarat lepas landas ini dibedakan

menjadi dua, yaitu:

- a) Tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merubah struktur masyarakat tradisional yang sudah ada.
- b) Yang dinamakan Rostow *boom free*, yaitu prasyarat lepas landas yang dicapai Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, dengan tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional, karena masyarakat negara-negara itu terdiri dari emigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas.

3) Tahap Lepas Landas (*Take Off*)

Suatu tahap interval dimana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini, beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan, serta merajai masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat.

Ciri-ciri tahap lepas landas yaitu:

- a) Adanya kenaikan dalam penanaman modal investasi (yang produktif, dari 5% atau kurang, menjadi 10% dari Produk Nasional Neto). $NNP = GNP - D$ (penyusutan).
- b) Adanya perkembangan beberapa sektor industri dengan laju perkembangan yang tinggi.
- c) Adanya atau terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial dan

institusional yang akan menciptakan:

- (1) Kenyataan yang membuat perluasan di sektor modern.
- (2) Potensi ekonomi ekstern sehingga menyebabkan pertumbuhan terus-menerus berlangsung.

4) Tahap Gerakan ke Arah Kedewasaan (*The Drive of Maturity*)

Gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya.

Ciri-ciri gerakan ke arah kedewasaan adalah:

- a) Kematangan teknologi, dimana struktur keahlian tenaga kerja mengalami perubahan.
- b) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan.
- c) Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.

5) Tahap Masa Konsumsi Tinggi.

Pada masa ini perhatian masyarakat mengarah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi. *Leading sectors*, bergerak ke arah barang-barang konsumsi yang tahan lama serta jasa-jasa. Pada periode ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia dan dukungan politis, yaitu:

- a) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut ke luar negeri dan kecenderungan ini dapat berakhir pada penaklukan

atas negara-negara lain.

- b) Menciptakan suatu *welfare state*, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada pendukungnya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif, dalam sistem perpajakan seperti ini makin besar pendapatan maka makin besar pajaknya.
- c) Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi dasar yang sederhana atas makanan, pakaian, rumah keluarga secara terpisah dan juga barang-barang konsumsi tahan lama serta barang-barang mewah.

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Samuelson, 2004 Dalam Rofii & Ardyan, 2017), ada empat faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain :

- 1) Sumber daya Manusia Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja adalah elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara efektif. Peningkatan persediaan jumlah tenaga kerja bagi proses produksi dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun dalam jumlah hari kerja orang (*mandays*) maupun jam kerja orang (*manhours*). Dapat saja terjadi jumlah orang yang bekerja tetap tetapi

jumlah hari kerja orang atau jam kerja orangnya bertambah. Untuk itu perlu diketahui bahwa tersedianya jam kerja dalam proses produksi itu dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Teori ekonomi telah menemukan bahwa kemauan seseorang untuk bekerja banyak dipengaruhi oleh tingkat upah yang tersedia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat upah, semakin tinggi kemauan seseorang untuk bekerja. Sementara itu, kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, kecakapan, keterampilan dan keahliannya. Lebih jauh lagi, tingkat kecakapan, keterampilan dan keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun nonformal seperti latihan-latihan kerja.

2) Sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam diantaranya adalah tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air serta bahan-bahan mineral. Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumber daya yang sangat besar dengan output besar dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Namun, pemilikan sumberdaya alam bukan merupakan keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Ada pula negara- negara maju yang meraih kemakmuran pada sektor industri. Hal ini dikarenakan adanya pemusatan perhatian pada sektor- sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal.

3) Pembentukan modal akumulasi modal selalu mencita-citakan

pengorbanan konsumsi pada saat ini selama beberapa tahun. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-negara dengan pertumbuhan paling pesat, 10-20 persen output akan masuk dalam pembentukan modal bersih.

- 4) Perubahan Teknologi dan Inovasi Kemajuan teknologi telah menjadi bagian vital keempat dari pertumbuhan batas hidup yang pesat. Saat ini, terjadi ledakan-ledakan teknologi baru, khususnya dalam informasi, komputasi, komunikasi dan sains kehidupan. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom sejak lama mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi bukan hanya sekedar prosedur mekanis untuk menemukan produk dan proses yang lebih baik. Sebaliknya, inovasi yang cepat memerlukan pemupukan semangat kewirausahaan

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2016:96), "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah di pisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal I menyebutkan: Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam

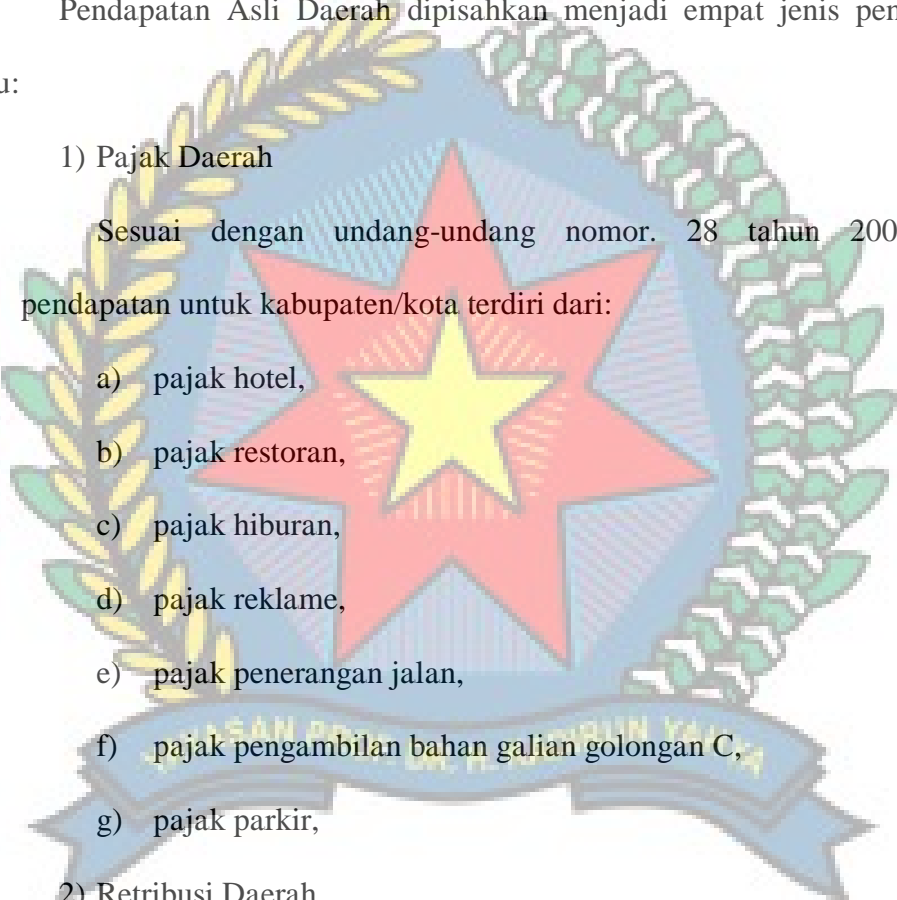
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal.

a. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1) Pajak Daerah

Sesuai dengan undang-undang nomor. 28 tahun 2009 jenis pendapatan untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 
- a) pajak hotel,
 - b) pajak restoran,
 - c) pajak hiburan,
 - d) pajak reklame,
 - e) pajak penerangan jalan,
 - f) pajak pengambilan bahan galian golongan C,
 - g) pajak parkir,

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan undang-undang perpajakan nomor 28 tahun 2009 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten /kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari:

- a) retribusi pelayanan kesehatan,
- b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

- c) retribusi penggantian biaya cetak KTP,
- d) retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil,
- e) retribusi pelayanan pemakaman ,
- f) retribusi pelayanan pengabuan mayat,
- g) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
- h) retribusi pelayanan pasar,
- i) retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- j) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- k) retribusi penggantian biaya cetak peta,
- l) retribusi pengujian kapal perikanan,
- m) retribusi pemakaian kekayaan daerah ,
- n) retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
- o) retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
- p) retribusi jasa usaha terminal,
- q) retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
- r) retribusi jasa usaha tempat penginapan/villa,
- s) retribusi jasa usaha penyedot kakus,
- t) retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
- u) retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal,
- v) retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga,
- w) retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air,
- x) retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
- y) retribusi jasa usaha penjualan produk usaha daerah,
- z) retribusi izin mendirikan bangunan,

- aa) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
 - bb) retribusi izin gangguan,
 - cc) retribusi izin trayek
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD),
 - b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN),
 - c) bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat,
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Sesuai dengan Mendagri nomor 59 tahun 2007 jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan,
- b) jasa giro,
- c) pendapatan bunga,

- d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
- e) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah,
- f) penerimaan keuntungan dari selisih dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h) pendapatan denda pajak,
- i) pendapatan denda retribusi,
- j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- k) pendapatan dari pengembalian,
- l) fasilitas social dan fasilitas umum,
- m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- n) pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

b. Potensi Peningkatan PAD

Dari segi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui kenaikan tarif maupun perluasan pajak daerah sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah macam pajak baru dengan kriteria:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dan memiliki mobilitas yang rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan.
- 3) Objek dan basis pengenaan pajak tidak berlawanan dengan kepentingan umum.

- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- 5) Memiliki potensi yang memadai.
- 6) Tidak memberikan pengaruh ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2015), otonomi daerah bukan berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka masyarakat daerahlah yang akan diberatkan. Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menaikkan pungutan yang bersifat pajak, jikapun ada yang naik hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah tidak dianjurkan untuk:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah terkait pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan impor/ekspor.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) merupakan kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun selanjutnya dari sumber-sumber

pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun pertama (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lag tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam usaha peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, supaya tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang membebani dunia usaha dan masyarakat. Upaya penaikan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *lawenforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta menaikkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya rendah.

3. Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, “belanja modal adalah pengeluaran anggaran guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal bertujuan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal adalah salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin layaknya biaya pemeliharaan pada kategori belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk

bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Menurut (Erlina, 2013) menyebutkan bahwa belanja modal adalah : Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut (Deddi, 2010) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran kegiatan untuk biaya pemeliharannya. Menurut (Halim, 2011) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Menurut (Siregar, 2015) belanja modal merupakan pengeluaran untuk persediaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap diklasifikasikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah "beban modal" sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk mendapatkan aset tetap atau aset lainnya yang bisa memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

a. Macam-Macam Belanja Modal

Menurut (Wertiant dan Dwirandra, 2013) yang termasuk dalam Belanja Modal adalah:

- 1) Belanja modal tanah;
- 2) Belanja peralatan mesin;
- 3) Belanja gedung dan bangunan;
- 4) Belanja modal jalan, saluran irigasi dan jaringan;
- 5) Belanja aset tetap lainnya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat dikelompokkan dalam lima kategori utama:

- 1) Belanja modal tanah
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan
- 4) Belanja modal jalan, saluran irigasi dan aringan
- 5) Belanja modal fisik lainnya

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal melingkupi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan cara:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Bangunan

BJJ : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

4. Dana Alokasi umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda. Menurut Mardiasmo (2015:142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah,
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas,
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan dalam APBN,

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto,
- b. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota,
- c. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model analisis	Hasil Penelitian
1	Dewi dan Ida (2018)	Pengaruh pad, pma dan inflasi terhadap provinsi bali	Pengaruh pad, pma dan inflasi	pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Hasil analisis menemukan bahwa variabel PAD secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PMA, variabel inflasi secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PMA, variabel PAD secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi,

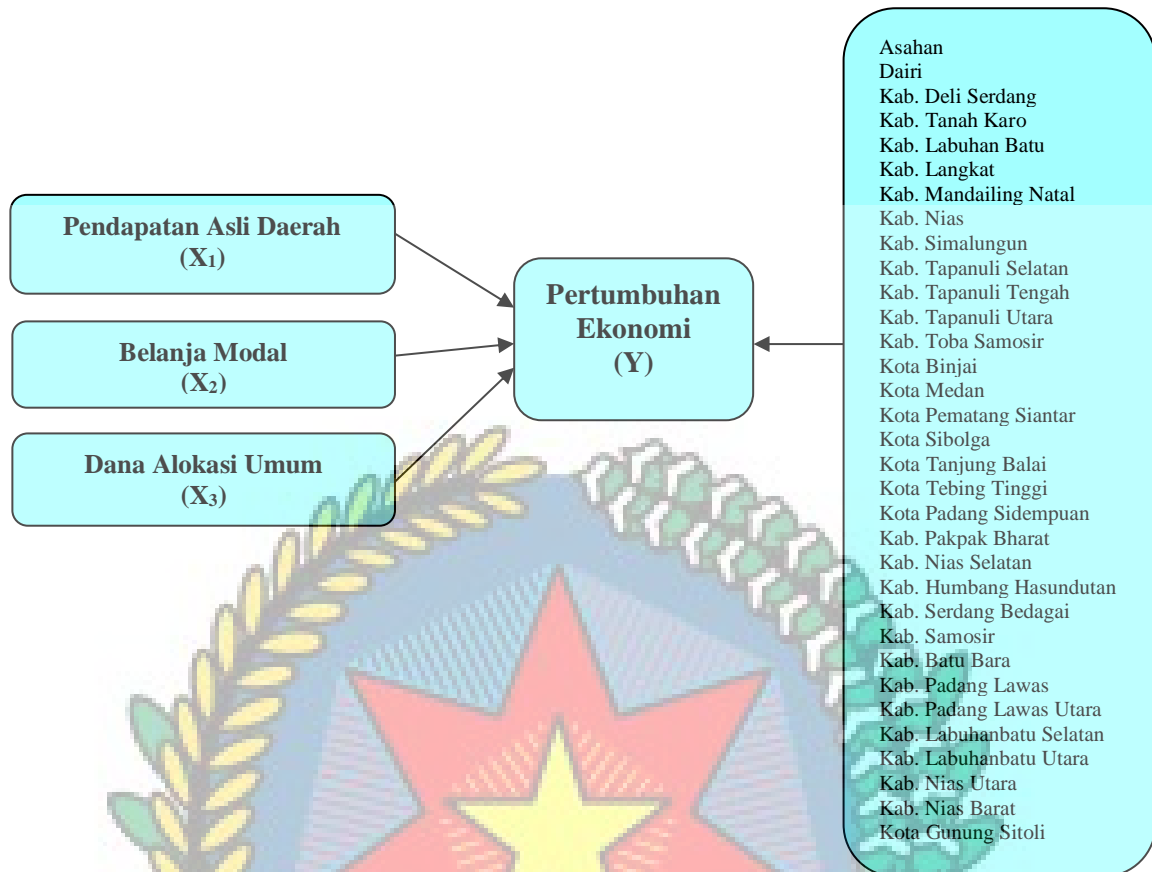
						variabel PMA berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2	Utami & Indrajaya (2019)	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di provinsi Bali	PAD dan Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3	Wardiah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4	Sulaeman & Silvia (2019)	Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia	Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal,	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Fajri (2016)	Pengaruh belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera	belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	regresi linear sederhana.	Hasil Pengujian Menunjukkan bahwa Belanja modal tidak Memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera
6	Putra (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan Signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan tidak dapat memoderasi hubungan

		Pemoderasi di Kabupaten /Kota Sumatera Utara				PAD dan belanjamodal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
7	Putu Candra Gunantara dan A.A.N.B. Dwiranda (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali	Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bali.
8	Nurmainah (2013)	Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah)	Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Belanja modal pemerintah daerah, penyerapan tenaga kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia adalah efek signifikan negatif terhadap kemiskinan.
9	Arini S (2016)	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di provinsi Bali	PAD dan Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. Sedangkan Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi

						di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.
10	Alper (2018)	The Relationship of Economic Growth with Consumption, Investment, Unemployment Rates, Saving Rates and Portfolio Investments in The Developing Countries.	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	pengeluaran rumah tangga memiliki pengaruh yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengeluaran konsumsi sebesar 1%, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,41%.
11	Gitana (2018).	Government expenditure and economic growth in the European Union countries	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Atas dasar analisis korelasi, delapan negara Uni Eropa memiliki hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif telah terdeteksi di Prancis, Belgia, Portugal dan Siprus. Hubungan negatif ditemukan di Swedia, Jerman, Polandia dan Slovakia.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan dari variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:



Sumber: data diolah, 2022

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, hipotesis penelitian ini adalah

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Sumatera Utara.
2. Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Sumatera Utara.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono,2019:11). Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Sumatera Utara.

B. Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan pada pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang tercatat di Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengakses website Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.sumut.bps.go.id. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

No	Kegiatan	2021				2022																			
		April-Sep				Feb – April				April - juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																								
2	Pembuatan Proposal																								
3	Seminar Proposal																								
4	Riset																								
5	Penyusunan Data																								
6	Analisis Data																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

Sumber : Diolah Penulis, 2022

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen, dan 3 (tiga) variabel independen.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Nama variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu	$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah (X1)	adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. PAD digunakan sebagai modal dasar pemerintah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + lain-lain PAD yang sah	Rasio
3	Belanja Modal (X2)	pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan	$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$	Rasio
4	Dana Alokasi Umum(X3)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Rasio

Sumber: data diolah, 2022

D. Jenis dan Sumber data

Pengumpulan data berdasarkan jenis dan sumber data sebagai berikut.

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. berjenis tipe data panel. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Menurut Gujarati (2012) data panel merupakan gabungan data *time series* dan data *cross section*. *Data time series* adalah data dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data *cross section* merupakan data yang diperoleh dari satu maupun lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Penelitian ini memiliki rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019, yang bersumber dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.sumut.bps.go.id.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data skunder. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan, literatur dari buku maupun artikel. Data juga diperoleh dari internet dari Website Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian

Keuangan. Sedangkan data mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data dengan metode regresi data panel dan uji asumsi klasik,

1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan *data time series* dengan *cross section*. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari *data cross section* yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda. Yaitu menggunakan *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect (Random Effect Model/REM)*

Data panel memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- a. Kombinasi observasi time series dan cross section membuat data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan kolinieritas lebih kecil antara variabel-variabel serta lebih efisien.
- b. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, dengan melihat hasil observasi dari cross section.
- c. Dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada data cross section murni maupun time series murni bisa dideteksi dengan data panel.
- d. Data panel dapat memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit dan juga membuat data menjadi berjumlah ribuan unit.

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara model CEM, FEM, atau REM yang paling tepat. Uji yang digunakan antara lain:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara *Common* atau *Pooled* dan *Fixed Effect* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji Chow memiliki hipotesis dalam pengujiannya yaitu:

H_0 : model mengikuti *Common* atau *Pooled*

H_a : model mengikuti *Fixed Effect*

Penentuan model yang baik mengikuti *Chi-Square* atau F-test dengan melihat apakah probabilitasnya (p-value) lebih besar atau lebih kecil dari alpha (α). Jika $p\text{-value} > \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima sehingga model mengikuti *Common* atau *Pooled*. Apabila nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Adapun hipotesis dari pengujian uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_a : model mengikuti *Fixed Effect*

Penentuan model yang baik mengikuti *Chi-Square* statistik atau *Cross Section Random* dengan melihat apakah probabilitasnya (p-value) lebih besar atau lebih kecil dari alpha (α) 0,05 atau 5%. Jika $p\text{-value} > \alpha$ (0,05), maka

H_0 diterima sehingga model mengikuti *Random Effect*. Apabila nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effect*.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar memiliki data yang normal dan terbebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala autokorelasi dan gejala heteroskedastisitas dijelaskan berikut ini.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal/mendekati normal. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018:110).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018: 105) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi korelasi. Jika korelasi antarvariabel independennya cukup tinggi (umumnya di atas 0.8), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi gejala multikolinearitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

Perubahan struktur ekonomi Sumatera Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 s.d 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB Rp. 51.838,13 miliar, meningkat terus hingga pada tahun 2021 nilainya mencapai Rp. 58.525,00 miliar.

Disisi lain, secara keseluruhan pengeluaran konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mengalami tren peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Akan tetapi, di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHK 2010 Rp. 32.714,16 miliar, dan tahun 2019 mencapai Rp. 34.942,09 miliar. Akan tetapi di tahun 2020, Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami sedikit penurunan yakni hanya Rp. 34.350,83 miliar dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan

kembali yakni Rp. 35.537,96 miliar. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas pada periode 2017-2021.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Konsumsi kolektif meliputi fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum lainnya, dan agama, serta kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, kebijakan, peraturan dari fungsi kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Sekitar 56 hingga 59 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal berdasarkan ADHB, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu dari Rp. 30.845,81 miliar (59,50 persen) pada tahun 2017 menjadi Rp. 31.894,44 miliar (54,50 persen) pada tahun 2021. Meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 nilai pengeluaran konsumsi kolektif pemerintah ini mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 30.841,85 miliar (55,29 persen).

Sementara itu, konsumsi individu secara nominal juga mengalami tren yang sama. Konsumsi individu meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah yang digunakan untuk membiayai fungsi kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial. Proporsi konsumsi individu berdasarkan ADHB mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 Rp. 20.992,32 miliar (40,50 persen) tahun 2017 menjadi Rp. 26.630,57 miliar (45,50 persen) tahun 2021 peranannya terhadap Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain nilainya terus meningkat, proporsi konsumsi individu juga terus mengalami tren yang meningkat.

Laju pertumbuhan total ekspor tahun 2017 hingga 2021 sangat berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 15,09 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2020 sebesar -10,31 persen dan tahun 2019 sebesar -2,05 persen. Kontraksi di tahun 2020 tersebut utamanya disebabkan oleh pembatasan kegiatan di masyarakat Sumatera Utara pada saat Pandemi COVID-19

Pada tahun 2017, pertumbuhan nilai impor barang dan jasa mencapai 6,15 persen, lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 10,97 persen. Selanjutnya pada 2019 dan 2020 impor barang dan jasa mengalami kontraksi yakni pada tahun 2019 sebesar -3,84 persen dan pada tahun 2020 sebesar -14,87 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan impor barang pada tahun 2019 dan 2020 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu -3,71 persen, tahun 2019 dan -14,80 persen pada tahun 2020. Di tahun 2021, impor barang mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi yakni mencapai 19,81 persen dan impor jasa mengalami kontraksi sebesar -0,55 persen dan secara total di tahun 2021 nilai impor barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar 18,34 persen.

Sedangkan PDRB perkapita pada harga berlaku secara kumulatif meningkat mulai tahun 2017 dari yang awalnya sebesar 48,00 juta rupiah menjadi 57,57 juta rupiah pada tahun 2021. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sumatera Utara rata-rata mampu menciptakan

PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing masing tahun tersebut.

2. Model Data Panel

Berikut hasil *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan Eviews 10.

a. *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 4.1 *Common Effect Model* (CEM)

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/18/22 Time: 23:01
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.262747	0.128068	41.09341	0.0000
PAD	3.33E-07	3.08E-07	1.080794	0.2818
BM	3.33E-07	5.35E-07	0.623093	0.5343
DAU	-3.41E-09	1.49E-09	-2.283177	0.0241
R-squared	0.108528	Mean dependent var		5.190227
Adjusted R-squared	0.087634	S.D. dependent var		0.463812
S.E. of regression	0.443023	Akaike info criterion		1.239444
Sum squared resid	25.12248	Schwarz criterion		1.326802
Log likelihood	-77.80333	Hannan-Quinn criter.		1.274942
F-statistic	5.194241	Durbin-Watson stat		0.197166
Prob(F-statistic)	0.002032			

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan koefisien PAD sebesar 3.33E-07 dan p-value atau probabilitas PAD adalah sebesar 0.2818, dimana variabel PAD tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB. Koefisien BM sebesar 3.33E-07 dan p-value atau probabilitas BM sebesar 0,5343, dimana variabel BM juga tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB. Koefisien DAU sebesar -3.41E-09 dan p-value tau probabilitas DAU sebesar 0.0241, dimana variabel DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB.

Model regresi data panel pada data pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Sumatera Utara diestimasi dengan *Common Effect Model* (CEM) ditunjukkan pada persamaan.

$$Y = 5,262747 + 3,33E-07 (PAD) + 3,33E-07 (BM) - 3,41E-09 (DAU)$$

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.2 Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/18/22 Time: 23:05
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.269640	0.088223	59.73082	0.0000
PAD	-3.41E-07	2.28E-07	-1.497937	0.1374
BM	1.91E-07	2.41E-07	0.791662	0.4305
DAU	-1.14E-09	8.70E-10	-1.313177	0.1923

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.922554	Mean dependent var	5.190227
Adjusted R-squared	0.894319	S.D. dependent var	0.463812
S.E. of regression	0.150779	Akaike info criterion	-0.719004
Sum squared resid	2.182490	Schwarz criterion	0.067215
Log likelihood	83.45425	Hannan-Quinn criter.	-0.399521
F-statistic	32.67364	Durbin-Watson stat	1.885823
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.2 menunjukkan koefisien PAD sebesar -3.41E-07 dan p-value atau probabilitas PAD adalah sebesar 0,1374, dimana variabel PAD tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB. Koefisien BM sebesar 1.91E-07 dan p-value atau probabilitas BM sebesar 0.4305, dimana variabel BM juga tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB. Koefisien DAU sebesar -1.14E-09 dan p-value tau probabilitas DAU sebesar 0.1923, dimana variabel DAU tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.

Model regresi data panel pada data pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Sumatera Utara diestimasi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) ditunjukkan pada persamaan.

$$Y = 5,269640 - 3,41E-07 (PAD) + 1,91E-07 (BM) - 1,14E-09 (DAU)$$

c. *Random Effect Model* (REM)

Tabel 4.3 *Random Effect Model* (REM)

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/18/22 Time: 23:06
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 132
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prpb.
C	5.192251	0.106407	48.79607	0.0000
PAD	-5.36E-08	1.86E-07	-0.288004	0.7738
BM	2.42E-07	2.37E-07	1.022162	0.3086
DAU	-9.01E-10	8.22E-10	-1.096030	0.2751
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.430376	0.8907
Idiosyncratic random			0.150779	0.1093
Weighted Statistics				
R-squared	0.019757	Mean dependent var		0.895542
Adjusted R-squared	-0.003218	S.D. dependent var		0.152433
S.E. of regression	0.152678	Sum squared resid		2.983764
F-statistic	0.859942	Durbin-Watson stat		1.386128
Prob(F-statistic)	0.463818			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.029585	Mean dependent var		5.190227
Sum squared resid	27.34715	Durbin-Watson stat		0.151236

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukkan koefisien PAD sebesar -5.36E-08 dan p-value atau probabilitas PAD adalah sebesar 0,7738, dimana variabel PAD tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB. Koefisien BM sebesar 2.42E-07 dan p-value atau probabilitas BM sebesar 0,3086, dimana variabel BM tidak

memiliki pengaruh terhadap PDRB. Koefisien DAU sebesar $-9.01E-10$ dan p-value atau probabilitas DAU sebesar 0,2751, dimana variabel DAU tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.

Model regresi data panel pada data pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Sumatera Utara diestimasi dengan *Random Effect Model* (REM) ditunjukkan pada persamaan.

$$Y = 5,192251 - 5,36E-08 (PAD) + 2,42E-07 (BM) - 9,01E-10 (DAU)$$

3. Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Uji spesifikasi ini akan menentukan salah satu model yang sesuai dari tiga modal yang ada, yaitu *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*. Uji spesifikasi model pertama kali dilakukan dengan menggunakan uji *Chow Test* untuk menguji apakah model lebih baik menggunakan *common effects* atau *fixed effects*. Adapun hipotesis

H_0 : *Common Effect Models* lebih layak

H_a : *Fixed Effect Models* lebih layak

Berikut hasil berdasarkan Uji Chow dengan menggunakan Eviews 10.

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.532775	(32,96)	0.0000
Cross-section Chi-square	322.515151	32	0.0000

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan hasil *redundant fixed effects test* memiliki nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang sesuai dari uji tersebut adalah *fixed effects*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model paling layak antara *Fixed Effect Models vs Random effect Models* dengan pengujian terhadap hipotesis :

H_0 : *Random Effect Models* lebih layak

H_a : *Fixed Effect Models* lebih layak

Berikut hasil berdasarkan uji hausman dengan menggunakan Eviews 10.

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.245165	3	0.1003

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan hasil *cross-section random* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1003 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, maka model yang sesuai dari uji tersebut adalah *random effects*. Karena kedua model ini menunjukkan keunggulan model *fixed effects* dan *random effect*, maka uji selanjutnya yaitu uji *lagrange multiplier* perlu dilakukan.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk memilih model paling layak antara *random effect models vs common effect models* dengan pengujian terhadap hipotesis :

H_0 : *Common Effect Models* lebih layak

H_a : *Random Effect Models* lebih layak

Berikut hasil berdasarkan uji *lagrange multiplier* dengan menggunakan Eviews 10.

Tabel 4.6 Hasil Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	145.1146 (0.0000)	1.487869 (0.2225)	146.6025 (0.0000)
Honda	12.04635 (0.0000)	-1.219782 --	7.655541 (0.0000)
King-Wu	12.04635 (0.0000)	-1.219782 --	2.360476 (0.0091)
Standardized Honda	12.65050 (0.0000)	-1.002393 --	4.243944 (0.0000)
Standardized King-Wu	12.65050 (0.0000)	-1.002393 --	0.027901 (0.4889)
Gourieriou, et al.*	--	--	145.1146 (< 0.01)

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji *Breusch-Pagan* nilai prob Both 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model yang sesuai dari uji tersebut adalah random effect. Selanjutnya hasil ketiga uji spesifikasi model yaitu uji chow, uji hausman dan uji *Lagrange Multiplier* berdasarkan nilai probabilitasnya dapat di rekapitulasi dengan sebagai berikut.

Tabel 4.7 Uji Kesesuaian Model Estimasi

Model Uji	Probabilitas	Keterangan
<i>Chow</i>	0.0000	<i>Fixed effect</i>
<i>Hausman</i>	0.1003	<i>Random effect</i>
<i>Lagrange Multiplier</i>	0.0000	<i>Random effect</i>

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

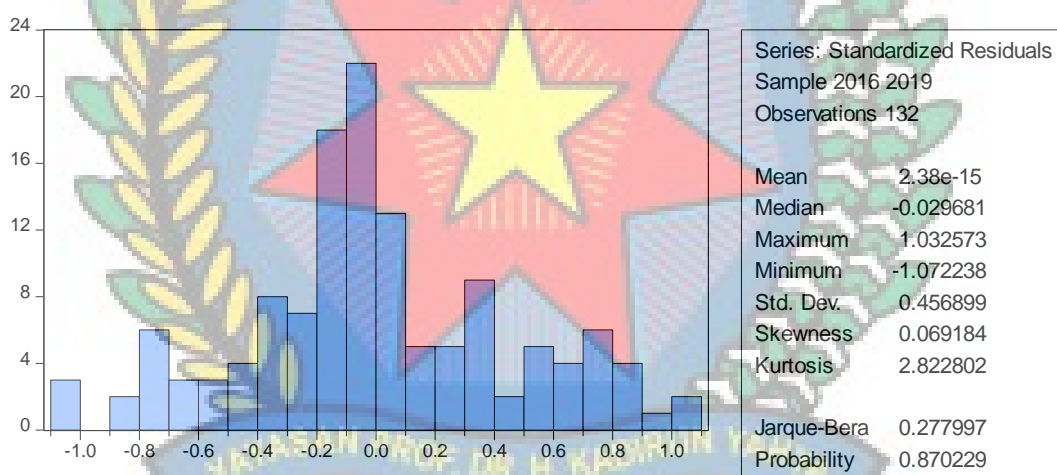
Berdasarkan uji kesesuaian model estimasi, dari ketiga uji diatas menunjukkan uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* mengindikasikan model *random effect* yang layak untuk dijadikan sebagai model.

4. Uji Asumsi Klasik

Analisis uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan multikolinearitas.

a. Uji normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan yaitu jika nilai probabilitas $pp \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi namun jika probabilitas $< 0,05$ maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Sumber: HasilOlah Software Eviews2022

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.1, diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0,870, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi

b. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, yakni diatas 0,9, maka hal ini

merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

	PAD	BM	DAU	PDRB
PAD	1.000000	0.738981	0.601433	0.265810
BM	0.738981	1.000000	0.582763	0.263206
DAU	0.601433	0.582763	1.000000	0.010042
PDRB	0.265810	0.263206	0.010042	1.000000

Sumber: Hasil Olah Software Eviews, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa korelasi antara PDRB dan PAD adalah 0.630356, PDRB dan BM adalah 0.596341, PDRB dan DAU adalah 0.656231. Dari hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini karena nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0,9 (Ghozali, 2018).

B. Pembahasan

Regresi data panel merupakan regresi yang menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Estimasi regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 estimasi yakni CEM, FEM dan REM. CEM adalah pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menduga parameternya. FEM adalah pendugaan parameter regresi panel dengan menggunakan teknik penambahan variabel dummy sehingga metode ini seringkali disebut dengan *Least Square Dummy Variable Model*. Sedangkan pada REM, efek individu diasumsikan bersifat random. REM lebih tepat di

estimasi dengan metode *generalized least square* (GLS) karena adanya potensi korelasi antara variabel gangguan dalam persamaan (Widarjono, 2013).

Berdasarkan hasil analisis penentuan model menunjukkan bahwa kedua uji model spesifikasi model yaitu uji Hausman dan *Lagrange Multiplier* mengindikasikan *random effect model* lebih layak digunakan dalam meramal pertumbuhan ekonomi. Sedangkan uji Chow mengindikasikan *fixed effect model* lebih baik. Dari ketiga uji tersebut, 2 uji mengisyaratkan *random effect model* lebih baik dalam meramal pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uji secara parsial menggunakan *random effect model* menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kab/kota di Sumatera Utara periode 2016-2019, karena nilai prob $0,7738 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kab/kota di Sumatera Utara. Dapat dikatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi dapat disebabkan pengelolaan PAD pada 33 kab/kota di Provinsi Sumatera Utara belum dikelola dengan efektif sehingga PAD bersifat fluktuatif. Adanya penerimaan PAD tersebut seyogianya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah jika dikelola dengan baik, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun temuan penelitian ini menunjukkan PAD belum dapat meningkatkan pertumbuhan masyarakat disebabkan pengelolaan PAD belum maksimal dan efektif dikelola.

Penerimaan PAD ini tidak saja digunakan untuk pembangunan perekonomian tetapi juga digunakan untuk sektor lainnya.

Hal ini juga dapat disebabkan ada faktor lainnya yang lebih dominan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 33 kab/kota di Sumatera Utara. Menurut Putra (2018) mengatakan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember tahun 2008-2017 adalah faktor sumberdaya alam yang memiliki *variance explained* tertinggi yaitu sebesar 96,65%, artinya bahwa faktor sumberdaya alam mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember tahun 2008-2017 sebesar 96,65%.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) dan mempunyai pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat keyakinan 95%. Sejalan dengan penelitian Prakarsa (2014) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Ini juga memperlihatkan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah justru menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berbeda dengan hasil temuan Wardiah (2018) dan Sulaeman & Silvia (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, akan memberikan peningkatan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai

modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Paat, 2017).

Selanjutnya variabel belanja modal juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi Sumatera Utara periode 2016-2019, dimana nilai prob $0,3086 > 0,05$. Dapat dijelaskan bahwa peningkatan belanja daerah belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) dan mempunyai pengaruh yang signifikan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat keyakinan 95%. Hal ini disebabkan belanja modal yang tersedia lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti: belanja tanah, belanja peralatan barang dan jasa yang habis pakai, mesin, belanja modal gedung dan bangunan untuk memperlancar operasional pemerintah. Belanja untuk biaya pembangunan sektor upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif kurang sehingga tidak menimbulkan peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya perekonomian masyarakat.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjalankan dengan baik kegiatan ekonomi sehingga dapat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran dapat tercapai. Agar dapat tercapainya kewajiban tersebut salah satu langkah atau kebijakan yang diambil yaitu, pemerintah perlu melakukan pengeluaran atau belanja, di mana belanja tersebut terbagi menjadi dua antara lain belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait tidak langsung dengan kegiatan program pemerintah. Belanja langsung merupakan

belanja yang dikeluarkan atau dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu terdiri dari (a) Belanja Pegawai (b) Belanja Barang dan Jasa (c) belanja modal (Paat, 2017)

Penelitian ini relevan dengan penelitian Fajri (2016) dan Gunantara (2014) menjelaskan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmainah (2013) dan Putra (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Halim (2016) menyatakan bahwa salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang berarti pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat. Sehingga segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada provinsi yang bersangkutan bisa terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat diraih oleh suatu daerah jika daerah tersebut terus bisa mereparasi infrastruktur yang ada di daerahnya.

Selanjutnya variabel dana alokasi khusus juga tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi Sumatera Utara periode 2016-2019, dimana nilai prob $0,2751 > 0,05$. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan dana

alokasi umum belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) dan mempunyai pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat keyakinan 95%. Hal ini disebabkan karena dana alokasi yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, hanya sebagian kecil yang digunakan. Sesuai penelitian Dewi (2017) dan Paseki (2014) bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda penelitian Gunantara dan Dwiranda (2014) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan di setiap Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk mendanai pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seyogiaya dana alokasi umum yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi jika dana alokasi umum tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran untuk meningkatkan laju perekonomian kab/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model regresi data panel pada data pertumbuhan ekonomi diestimasi dengan Common Effect Model (CEM) adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,262747 + 3,33E-07 (PAD) + 3,33E-07 (BM) - 3,41E-09 (DAU)$$

2. Model regresi data panel pada data pertumbuhan ekonomi diestimasi dengan Fixed Effect Model (FEM) adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,269640 - 3,41E-07 (PAD) + 1,91E-07 (BM) - 1,14E-09 (DAU)$$

3. Model regresi data panel pada data pertumbuhan ekonomi diestimasi dengan Random Effect Model (REM) adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,192251 - 5,36E-08 (PAD) + 2,42E-07 (BM) - 9,01E-10 (DAU)$$

4. Hasil uji kesesuaian model estimasi, uji Chow mengindikasikan model *fixed effect* lebih unggul daripada *random effect*. Pada uji Hausman dan uji *Lagrange Multiplier* mengindikasikan model *random effect* yang layak untuk dijadikan sebagai model. Maka model terpilih atau layak untuk pembuktian hipotesis yaitu *random effect*.

- 1) Hasil analisis *random effect* model menunjukkan pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagai mana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

- 1 Bagi pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu mengevaluasi dan mengoptimalkan kegiatan mengeksplor dan mengelola pendapatan asli daerah dan penggunaan belanja modal serta dana alokasi umum untuk pembangunan masyarakat.
- 2 Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan pengamatan objek yang lebih luas tidak hanya satu provinsi saja sehingga dapat dijadikan acuan untuk suatu permasalahan seperti pertumbuhan ekonomi
- 3 Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak daerah atau objek penelitian sehingga sampel yang diperoleh juga lebih banyak dan data yang didapatkan juga menjadi lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alper, A. (2018). The Relationship of Economic Growth with Consumption, Investment, Unemployment Rates, Saving Rates and Portfolio Investments in The Developing Countries. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 17(3), 980–987. <https://doi.org/10.21547/jss.342917>
- Dudzevičiūtė, Gitana. Šimelytė, Agne. Liučvaitienė, Ausra. 2018. Government expenditure and economic growth in the European Union countries. *International Journal of Social Economics*. Vol. 45(2), hal.372-386.
- Dewi dan Ida. 2018. Pengaruh pda, pma dan inflasi terhadap pertumbuhan Ekonomi provinsi bali Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [11] :502-512.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Ghozali., Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, Putu Candra dan Dwiranda, A.A.N.B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 7(3), hal. 529-546.
- Halim, A. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nurmainah. Santi. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 20(2), hal. 131–141.
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Sugiono. 2017. *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar (Pertama)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). *Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap PErumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. 4(1), 97–112.

Rofii, A. M., & Ardyan, P. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 303–316.

Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Utami, D. N., & Indrajaya, G. B. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.

Wardiah. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(1), 61–70.

